

IDENTITAS

Harus Konsisten

RENCANA Disdag (Dinas Perdagangan) Kota Mataram yang akan menjadikan pasar Cakranegara sebagai pusat kuliner, cukup positif, mengingat Kota Mataram memang belum memiliki pusat kuliner. Lokasi Pasar Cakranegara yang strategis di jantung Kota Mataram membuatnya dipilih sebagai salah satu alternatif pusat kuliner. Pembangunan pusat kuliner ini sejalan dengan menggeliatnya sektor pariwisata di Lombok. Beberapa tahun belakangan Lombok semakin banyak dikunjungi wisatawan.

Lombok menjadi pilihan wisatawan untuk berlibur selain Bali. Dunia pariwisata tentu sangat lekat dengan destinasi, pusat oleh-oleh dan juga pusat kuliner. Lombok sebagai salah satu daerah tujuan wisata menjadi celah bagi Pemkot Mataram untuk mengembangkan sektor pendukung pariwisata. Mataram sebagai ibukota Provinsi NTB menjadi pusat segala galanya. Tidak heran kalau banyak hotel dan restoran dibangun di Mataram.

Terpilihnya Lombok sebagai destinasi wisata hal dunia ibarat gayung bersambut dengan ditunjungnya Mataram sebagai PKN (Pusat Kegiatan Nasional) untuk kawasan Indonesia Timur. Apalagi Kota Mataram konsen pada pengembangan pariwisata MICE (Meeting, Incentive, Convention and Exhibition). Sehingga kehadiran pusat kuliner menjadi hal yang strategis dan cukup penting. Namun yang menjadi catatan adalah, rencana itu harus dikonkretkan. Tidak sebatas rencana apalagi wacana.

Menyulap Pasar Cakranegara menjadi pusat kuliner, tidak sederhana yang dibayangkan. Banyak hal yang perlu dipersiapkan. Seperti kemampuan pedagang, cara menyambut pengunjung yang datang. Walaupun pengunjung yang ingin berkuliner bukan semata wisatawan asing atau wisatawan dari luar daerah tapi juga wisatawan lokal. Dengan kondisi Pasar Cakranegara yang sudah tidak representatif, Pemkot Mataram sepertinya memang harus melakukan pembangunan ulang pasar tersebut.

Pembangunan kembali pasar Cakranegara menjadi pusat kuliner NTB sudah pasti membutuhkan anggaran yang besar. Ini salah satu yang harus dipikirkan oleh Pemkot Mataram. Karena kalau berharap dari APBD Kota Mataram nampaknya tidak memungkinkan. Pasalnya dengan APBD yang hanya Rp 1,2 triliun, Pemkot Mataram harus membiayai sejumlah program. Jika ingin mengubah identitas pasar Cakranegara, dari pasar tradisional menjadi pusat oleh-oleh Disdag harus berani berinovasi.

Soal anggaran, Disdag dapat jemput bola ke pusat. Di Kementerian Perdagangan terdapat cukup banyak anggaran untuk perbakan bahkan pembangunan pasar. Persoalan sekarang apakah Pemerintah daerah mau menjemput anggaran itu di pusat. Di sinilah Disdag harus berinovasi. Pemkot Mataram harus mampu meyakinkan pemerintah pusat untuk mau membantu

Impor Beras dan Kemarahan Petani

Oleh: Riza Multazam Luthfy

(Peneliti Desa, Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum UIN Yogyakarta)

KEMENTERIAN Perdagangan (Kemendag) bakal memperpanjang waktu pengimporan impor beras se-

banyak 20.000 ton kepada Bulog. Merespons rencana tersebut, ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir melakukan "perlawanan". Ia meminta supaya pemerintah segera menghentikan kebijakan impor. Dalam pandangannya, impor beras rentan membuat harga beras dalam negeri terganggu. Pasalnya, sejumlah daerah tengah mengalami panen raya.

Apa yang diperjuangkan oleh Winarno bertolak belakang dengan dalih pemerintah yang menilai bahwa kebijakan impor merupakan upaya menurunkan harga komoditas beras lantaran pasokannya dinilai terbatas. Terhadap keputusan pemerintah, sedikitnya sudah ada tiga daerah yang menyuarakan penolakan. Kebijakan impor dengan melibatkan lima negara tersebut ditolak secara terang-terangan oleh Aceh Barat, Kulon Progo (Yogyakarta) dan Lebak (Banten).

Langkah pemerintah di atas semestinya dibarengi dengan penjelasan logis bahwa kebijakan impor memang diperlukan guna mengatasi kondisi perberasan dalam negeri. Apalagi, sejumlah pihak melihat adanya kegagalan dalam usaha menghadirkan beras dari negara lain tersebut. Selain menghindarkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, rasionalisasi juga dilakukan demi meredakan kemarahan petani.

Narasi Perlawanan

Dalam catatan sejarah, kebijakan perberasan nasional dahulu kala memperoleh penolakan kaum tani. Apa yang kerap diputuskan oleh pemerintah tentang beras ternyata menyulut emosi masyarakat. Munculnya kerusuhan di beberapa tempat antara lain merupakan imbas dari kondisi perekonomian lokal yang kembang-kempis, ditambah dengan lamanya penderitaan para petani merasa kejamnya kolonialisme.

mentah Jepang tersebut berhasil ditindas dengan keji.

Pembangkangan sekaligus gita-si di atas menumbuhkan inspirasi bagi tindakan serupa lainnya. Sehingga, sejumlah perlawanan yang didalangi oleh para haji setempat meletus di Jawa Barat pada bulan Mei dan Agustus 1944. Sejak itulah perlawanan kaum tani merupakan fenomena umum yang kerap ditemui. Pendirian cabang-cabang Kantor Urusan Agama (*Shumuka*) di seluruh Jawa dengan mengangkat Hasyim Asy'ari selaku kepala merupakan salah satu inisiatif pemerintah Jepang dalam menekan perlawanan kelompok Islam pedesaan. Namun demikian, pada waktu itu kelompok Islam pedesaan kerap menjadi kekuatan besar yang tak mudah ditumpas (Jan S. Arntonang, 2004: 222).

Bukan hanya kebijakan perberasan nasional, ternyata kebijakan perberasan daerah juga pernah mengalami penolakan. Setelah kemerdekaan, sebagian kebijakan pemerintah daerah menyangkut komoditas beras ditentang oleh kaum tani. Menurut mereka, jerih payah pengolah hasil bumi tidak dihormati dan diabaikan.

Menanggapi pembelian padi oleh pemerintah daerah Yogyakarta, organisasi petani setempat dalam suatu rapat berpendapat bahwa cara tersebut sangat bertentangan dengan kehendak kaum tani. Berdasarkan pandangan perkumpulan yang mengutamakan kepentingan profesi mayoritas orang desa tersebut, beras yang dihisilkan oleh para petani bakal mengalir deras ke wilayah perkotaan. Padahal, keadaan demikian mengakibatkan masyarakat penghasil beras di desa mesti membelinya dari kota dengan harga selangit.

Atas dasar inilah, para petani memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah. Harapannya, di waktu yang akan datang mereka

mampu menjadi manusia-manusia mandiri. Dengan demikian, di samping memiliki ekonomi berdikari, kerja keras para petani juga memperoleh apresiasi. Mengutip surat kabar *Keng Po* edisi 10 Juli 1951, "organisasi petani itu memberi suggesti, supaya sebaiknya didirikan suatu lumbung patjekklik yang dikuasai oleh tani sendiri. Pembelian padinya harus dikerjakan oleh suatu panitia terdiri dari wakil-wakil tani dan badan-badan pemerintah yang bersangkutan."

Pemanfaatan Data

Munculnya resistensi terhadap kebijakan perberasan semestinya menjadi bahan refleksi bagi pemerintah untuk senantiasa berbenah. Sesuai dengan salah satu Nawa Cita pemerintah Jokowi-Kalla "mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik", tindakan memasukikkan komoditas dari negara lain yang rentan merugikan rakyat kecil seharusnya senantiasa ditekan.

Di sinilah perlunya memanfaatkan data dalam rangka meminimalkan kebijakan impor di masa mendatang. Penelitian-penelitian yang berhubungan dengan bidang agraris menjadi acuan berharga sebelum terbitnya kebijakan. Berbagai riset bermutu yang selama ini menghisilkan tak-rak perpustakaan kampus mulai dijadikan referensi guna merancang sistem perekonomian yang efektif dan operasional. Dengan demikian, langkah Orde Baru dalam menanggulangi impor tidak kembali terulang.

Sebagaimana diketahui, Program Bina spertama kali diluncurkan pada tahun 1965 sampai 1966 dengan tujuan mengontrol produksi agraris. Melalui program ini, pemerintah ingin mengurangi ketergantungan negara terhadap impor beras. Para petani mulai dikenalkan dengan penggunaan benih ung-

gul pupuk buatan serta pestisida. Dalam perkembangannya, generasi Program Binas membuat produksi padi meningkat. Akan tetapi akibat sistem target dan mudahnya pencairan kredit, program ini melahirkan bermacam penyelewengan hingga level yang paling rendah. Pelaku penggelapan dana bukan hanya terdiri dari aparat desa mulai kepala desa (lurah), juru tulis, sampai hansip. Masyarakat awam sekalipun secara luas bisa memalsukan informasi kepemilikan sawah (Her Suganda, 2009: 192-193).

POJOK

Mataram gagal pertahankan Adipura

Akibat persoalan sampah yang tak pernah tuntas

...

Gangguan teknis, UNBK dua SMA di Dompu molor

Akibat persiapan tak matang

...

Bang Sentil